

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sekarang ini dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas (Bahri, 2012). Salah satu unsur reformasi sektor publik adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sulisiana, 2013). Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, professional dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat mencintapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (komang Sri Endrayani, 2014).

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian berfungsi pula sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik (Bahri, 2012). Anggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal (Laura wahdatul, 2012). Melalui *proses* anggaran berbasis kinerja pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program pelayanan, kemudian pemerintah daerah dapat membuat target untuk pencapaiannya, dengan demikian pengeluaran dilakukan berdasarkan prioritas dan unit kerja harus bertanggungjawab terhadap hasil output dan outcome (Adisasmita, 2011:52).

Namun pada kenyataannya, Sumiyati (2015) selaku Kepala Badan pendidikan dan pelatihan Keuangan mengemukakan bahwa, terjadi empat permasalahan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, permasalahan itu menyangkut governance, ownership pimpinan, SDM dan sistem informasi. Dalam governance mempunyai masalah dalam penerapannya, apakah sudah menggunakan prinsip *let's managers manage?* Seharusnya yang di fokuskan

pengendalian pada *outcome/output*, tidak hanya pada inputnya saja. Dan dalam sistem peranan auditor harus dapat membangun sistem, bukan hanya mengejar kesalahan, tetapi perbaiki arsitektur kinerja dalam proses kedepan. Sedangkan dalam permasalahan ownership pimpinan perlu memiliki waktu untuk membangun *logic model*, pada tingkat strategis. Perlu proses yang intensif untuk membangun *logic model* antar instansi dan terakhir permasalahan dalam SDM, semua manajer perlu menguasai tentang arsitektur kinerja dan *logic model*. Hal ini sangat krusial disaat manajer suatu organisasi tidak membangun pola *logic model* dengan baik, maka akan membuat penilaian akuntabilitas terhadap kinerjanya pun akan menurun, karena peran manajer yang memiliki kuasa akan sedikit menyulitkan.

Pada tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Pemerintah Kota Bandung yang masih bermasalah dalam hal laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Bandung. Penilaian itu menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung sehingga Pemerintah Kota Bandung terus gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masalah yang paling utama yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu masalah pengelolaan asset dimana beberapa asset milik pemerintah kota Bandung belum

teradministrasi dengan baik dan juga asset-aset yang statusnya masih tidak jelas. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan asset tersebut menyangkut asset tetap yang belum tertib yaitu penyajian asset tetap yang belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, dan penomoran atau kodefikasi yang belum dilakukan sehingga harus dibentuk pansus penataan asset daerah yang bertugas mendata ulang lebih rinci jumlah asset milik Pemerintah Kota Bandung.

Menurut Holid Nurjamila (2017) Selaku Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembagunan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 50-65 atau peringkat “CC” , hal ini dikarenakan tidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indicator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran selain itu LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sistem pelaporan keuangan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplemasikan anggaran yang telah ditetapkan ,setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2011:159) .

Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010 : 297).

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) menyatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak (2016) menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH** “.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadi dua permasalahan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, permasalahan itu menyangkut *ownership* pimpinan, dan sistem informasi (Sumiyati, 2015).
2. Masih adanya kekurangan penerimaan, kasus administrasi dan ketidakefektifan sehingga BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bandung. (BPK, 2015)
3. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah memperoleh predikat "CC", hal ini dikarenakan tidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indicator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran selain itu LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yangmengarah pada peningkatan kualitas implementasi belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Holid Nurjamila, 2017)

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran dalam topik penelitian Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada dikota maupun kabupaten.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada dikota maupun kabupaten.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak instansi pemerintah dan pemecahan masalah mengenai adanya Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Kegunaan Akademis adalah untuk keperluan pengembangan keilmuan, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai sarana pengaplikasian teori sehingga berguna bagi pihak akademis lain yang memerlukan bahan terhadap pembuatan skripsi maupun makalah.